

## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian mengenai harmoni sosial keagamaan masyarakat multikultural di Denpasar Bali, maka melalui penelitian tentang konstruksi sosial kerukunan antarumat beragama Islam-Hindu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meneguhkan kembali kerukunan antarumat beragama (Hindu-Islam) masyarakat Denpasar Bali sepakat untuk menghidupkan kembali tradisi yang pernah dikembangkan oleh nenek moyang mereka yaitu tradisi *menyama braya*. Tradisi ini dikembangkan melalui pola-pola sebagai berikut: Pertama, jalur politik, untuk meneguhkan kembali kerukunan antarumat beragama Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti Peraturan Gubernur Bali tanggal 16 Juli 2008, Nomor 32 tahun 2008 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan mengeluarkan Surat Keputusanya Nomor 8 tahun 2009 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan keputusan Walikota Denpasar nomor 188.45/76/HK/2009 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Denpasar. Di samping kebijakan bersifat tertulis seperti (Peraturan-peraturan dan Surat-Surat Keputusan) Pemerintah Daerah bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti FKUB, FKAEN, PHMB, Ulama, Umara dan juga bersama desa pakraman mengadakan dialog-dialog secara

rutin dan berkesinambungan. Kedua, melalui jalur budaya. Masyarakat Denpasar adalah bagian daripada Bali, sedang Bali adalah identik dengan budaya lokalnya, maka untuk membangun kerukunan antarumat beragama, pemerintah bersama masyarakat menghidupkan kembali budaya lokalnya yaitu budaya *menyama braya*. Ketiga, melalui jalur sosial, keragaman budaya di Denpasar merupakan sebuah keniscayaan, maka untuk menjaga keberadaan kerukunan antarumat beragama selama ini masyarakat Denpasar membangunnya melalui lembaga pendidikan dan juga jejaring sosial (LSM). Lembaga pendidikan misalnya, beberapa yayasan yang berbasis Islam seperti MTs Miftahul Ulum di kampung Jawa, SMP Muhammadiyah di kampung Kapaon, mereka mencoba membangun pendidikan berbasis pluralisme dan multikulturalisme. Sedang jejaring sosial seperti: Forum Komunikasi Antar Etnis Nusantara (FKAEN), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Persaudaraan Hindu-Muslim Bali (PHMB). Tujuan dari forum-forum tersebut tidak lain adalah untuk menjaga dan melestarikan tradisi *menyama braya* dalam kaitanya dengan kerukunan antarumat beragama di daerah setempat.

2. Kokohnya kerukunan antarumat beragama Islam-Hindu di Denpasar Bali sebagaimana tersebut di atas adalah berkat adanya peran masyarakat serta beberapa institusi yang ada seperti institusi Pemerintah, Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Politik, Lembaga-Lembaga Keagamaan, Lembaga-Lembaga Adat dan juga masyarakat setempat. Mereka menjalin komunikasi yang intensif antarmereka sehingga budaya *menyama braya* selalu melekat pada masyarakat Denpasar pada umumnya. Dalam hal ini peran media juga

tidak bisa kesampingkan seperti media elektronik maupun media cetak selalu mensosialisasikan budaya *menyama braya* yang ada di Bali. Seperti TV Bali, Bali Pos dan buletin-buletin maupun spanduk di jalan-jalan sepanjang kota Denpasar Bali.

3. Realitas sosial mengenai kerukunan antarumat beragama Islam-Hindu di Denpasar Bali terkonstruksi melalui tiga momen yaitu: Pertama, eksternalisasi, pada momen ini, *menyama braya* dikonstruksi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sumber-sumber kitab suci, intepertasi ulama dan intelektual terdahulu. Sehingga gagasan dan praktik toleransi antarumat beragama memiliki landasan kesejarahan, ajaran-ajaran serta nilai-nilai yang menjadi tekanan dari ajaran kitab sucinya. Karena *menyama braya* merupakan agenda *civil society*, maka konsep toleransi antarumat beragama diberikan makna dan dikembangkan secara dinamis melalui dialektika wacana yang berkembang dalam konteks sosial, politik dan budaya pada semua lapisan masyarakat kota Denpasar Bali.

Kedua, obyektivasi, pada momen ini, *menyama braya* dikonstruksi dengan cara menyesuaikan diri dengan tradisi-tradisi yang sudah mapan untuk disesuaikan dengan instrumen-instrumen yang dihasilkan oleh para ulama (Islam), *pinisepeuh* (Hindu) dan para intelektual untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam memahami dan menghargai suatu perbedaan. Dalam memelihara dan mempromosikan nilai-nilai *menyama braya* di Denpasar Bali menampilkan gambaran yang beragam, artinya ada yang bersifat responsif dan ada juga yang bersifat diam (*silent majority*). Sikap responsif terhadap usaha

penegakan nilai-nilai *menyama braya* dalam bentuk toleransi antarumat beragama banyak diwakili oleh unsur struktural (pemerintah), lembaga-lembaga sosial maupun oleh lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Sedang sikap diam (*silent majority*) terhadap usaha penegakan nilai-nilai *menyama braya* dalam kaitannya dengan toleransi antarumat beragama di Denpasar Bali muncul pada kelompok pemahaman dan sikap keberagamaan yang eksklusif baik dari kalangan Hindu maupun Islam.

Ketiga, momen internalisasi. Pada momen identifikasi dengan sosio-kultural ini biasanya mereka mengacu pada nash-nash kitab sucinya. Karena adanya perbedaan kemampuan pemikiran keagamaan, metodologi penafsiran, dan perbedaan tempat dan budaya yang mengitarinya, maka gagasan untuk mengimplementasikan *menyama braya* dalam kaitannya dengan toleransi antarumat beragama akan menjadi berbeda. Sehingga pada varian ini dimungkinkan akan terjadi gesekan-gesekan yang berujung pada ketegangan yang sulit didamaikan.

## **B. Implikasi Teoritik**

Secara teoritik, sejauh mengacu pada temuan implikasi utama dari studi ini menyangkut teoritisasi seputar harmoni sosial keagamaan masyarakat multikultural dalam kaitannya dengan kerukunan antarumat beragama Islam-Hindu di Denpasar Bali, terdapat beberapa teori besar seperti konsepsi Geertz, agama dan tindakan manusia mengambil bentuk hubungan yang saling mempengaruhi dan memberikan pola. Pada satu sisi, agama difungsikan sebagai pedoman yang dijadikan kerangka interpretasi tindakan manusia. Disini agama

ditempatkan sebagai pola bagi tindakan (*pattern for behavior*). Pada sisi lain, tindakan dinamis manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan refleksi dari keberagamaannya, sehingga agama dapat dipahami melalui pola tindakan individu maupun masyarakatnya.<sup>1</sup>

Emile Durkheim berpandangan bahwa agama bukan hal yang “imajiner” (khayalan), tetapi ia adalah suatu yang nyata. Agama merupakan sebuah ekspresi masyarakat itu sendiri. Tentunya, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki agama, karena ia merupakan suatu kesadaran kolektif berupa penyatuan dari seluruh kesadaran individu yang kemudian menciptakan sebuah realitas terhadap dirinya sendiri.<sup>2</sup> Sedangkan Max Weber mengatakan, ajaran agama merupakan spirit bagi kehidupan sosio-kultural sehingga situasi kehidupan ekonomi tidak selalu ditentukan oleh nilai-nilai materialistik, tetapi oleh nilai esensial (*essential value*).<sup>3</sup> Harmoni sosial keagamaan dalam kaitannya dengan kerukunan antar umat beragama di Denpasar merupakan salah satu bentuk tindakan keagamaan komunitas Hindu maupun Islam yang bercermin dari semangat kitab sucinya masing-masing. Bagi mereka, agama adalah sebagai kerangka untuk menentukan kehidupan sehari-harinya di tengah-tengah masyarakat multikultural sehingga toleransi beragama bagi mereka adalah sebuah keniscayaan.

---

<sup>1</sup> Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, terj. Francisco Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 8.

<sup>2</sup> Emile Durkheim, *The Elementary Form of the Religious Life* (London: George Allen & Unwin, 1947), 105.

<sup>3</sup> Silfia Hanani, *Menggali Interelasi Sosiologi dan Agama* (Bandung: Humaniora, 2012), 27.

Dalam kaitannya dengan isu pluralisme keagamaan yang berkembang di berbagai negara, Fazlur Rahman,<sup>4</sup> Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid,<sup>5</sup> Budhy Munawar Rachman,<sup>6</sup> dan Alwi Shihab<sup>7</sup> menempatkan Islam sebagai agama yang mendukung penegakan pluralisme dan menjadikannya sebagai doktrin sentral menuju visi kemanusiaan. Pluralisme agama bagi mereka bukan hanya dalam tataran pemahaman konsep tetapi pluralisme agama harus diimplementasikan dalam dunia praktis, yaitu kerjasama yang harmonis antarpemeluk agama yang ada. Dalam kaitannya dengan studi ini, yaitu kondisi masyarakat Islam-Hindu di Denpasar dalam membina dan meneguhkan kembali pluralisme bukan hanya dalam tataran pemahaman dan kesadaran saja akan tetapi diimplementasikan dalam bentuk nyata. Pola yang dikembangkan melalui jalur politik, budaya, dan soial.

Hal yang demikian seiring dengan apa yang digambarkan oleh Fazlur Rahman dalam *Major Themes of the Qur'an*, bahwa kebijakan-kebijakan Nabi terhadap ahlul kitab memperlihatkan adanya kesadaran pluralisme yang sangat tinggi, walaupun hal itu tidak dilakukan berdasarkan wawasan mengenai pluralisme itu sendiri, tetapi kebijakan-kebijakan Nabi itu akan menentukan orientasi keseluruhan doktrin Islam dan aspek-aspek budaya penting lainnya yang memiliki kemungkinan berkembang di masa yang akan datang di berbagai

---

<sup>4</sup> Fazlūr Raḥmān, *Islam and Modernity :An Intelektual Transformation* ( Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1979), 42.

<sup>5</sup>Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2004), 5.

<sup>6</sup> Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001), 23.

<sup>7</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragam* ( Bandung, Mizan, 1997), 7.

kawasan.<sup>8</sup> Senada dengan pandangan Rahman, Abdulazis Sachedina dalam bukunya *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, menyatakan al-Qur'an adalah sebuah teks yang secara intrinsik menghormati keragaman (*diversity*), dan memberikan koreksi atas pemikiran dan sikap kaum eksklusif modern yang lebih dimotivasi oleh situasi politik dan sosio-ekonomi ketimbang agama.<sup>9</sup>

Sedangkan temuan yang terkait dengan latar belakang terjadinya harmoni sosial keagamaan yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama Islam-Hindu sekurang-kurangnya berangkat dari teori hegemoni yang digagas Gramsci. Menurutnya, hegemoni adalah kepemimpinan intelektual dan moral. Hegemoni didukung oleh intelektual organik yang terus menerus menyokong, mengembangkan, dan menyebarkan ideologi hegemoni penguasa.<sup>10</sup> Hal inilah yang mewarnai pembangunan ekonomi di bidang pariwisata di Bali, sehingga masyarakat Bali yang mempunyai kekhasan sebagai budaya (Hindu Bali) hampir tersingkirkan karena adanya hegemoni pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Bali berubah menjadi di persimpangan jalan yang pada ujungnya terjadi Bom Bali 2002. Tragedi ini memperburuk hubungan Islam-Hindu di Bali yang sudah terjalin beratus-ratus tahun lamanya. Karena adanya hegemoni pemerintah Orde Baru itu, maka masyarakat Bali ingin menata kembali bangunan masyarakat madani yang berangkat dari kearifan lokalnya (*local wisdom*) dengan cara melestarikan kembali tradisi *menyama braya* sebagai ciri khas budaya dan agama Hindu di Bali.

---

<sup>8</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980), 28.

<sup>9</sup> Abdulazis Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, (New York: Oxford University Press, 2001), 69.

<sup>10</sup> Antonio Gramsci, *Selection from Prison Notebooks* (New York: International Publisher, 1971), 57.

Implikasi teoritik terkait dengan peran institusi-institusi sosial (ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah) terdapat teori besar yang digagas Geertz yang menyebutkan peran ulama sebagai *cultural broker* (makelar budaya)<sup>11</sup> dan juga Horikoshi yang dikutip oleh Endang Turmudi bahwa ulama bukan hanya sekedar berperan “menyaring informasi” melainkan juga sebagai kreator aktif dalam perubahan sosial.<sup>12</sup> Hingga tingkat tertentu, kedua tesis tersebut dapat dilekatkan sebagai kebijakan para ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintahan di Denpasar Bali dalam menjalankan peran profetiknya. Mereka tidak hanya memainkan peran sebagai “makelar budaya”, tetapi juga berperan aktif menggerakkan dinamika perubahan sosial. Secara efektif, mereka menjadi figur panutan atau patron masyarakat setempat. Artinya, mereka berupaya tampil sebagai penentu cikal bakal wacana keagamaan masyarakat, khususnya dalam konteks harmoni sosial-keagamaan yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama Islam-Hindu di Denpasar Bali.

Sedang implikasi teoritik yang terkait dengan masyarakat multikultural (*Nyama Selam* dan *Nyama Bali*) dalam mengkonstruksi bangunan kerukunan antarumat beragama, bahwa masyarakat Islam di Denpasar Bali (etnis migran) mereka bercampur, berasimilasi dan berintegrasi dengan masyarakat setempat (Denpasar). Mereka meninggalkan akarnya sendiri dengan harapan memasuki dunia baru yang lebih menjanjikan, jarang mengajukan tuntutan etnis yang kongkrit.

---

<sup>11</sup> Geertz melihat peran kiai di Jawa tak ubahnya seperti agen pembawa nilai baru bagi masyarakat. Artinya bahwa kiai tak hanya mengajarkan agama saja akan tetapi juga mengenalkan modernisasi budaya. Lihat Clifford Geertz, “The Javanese Kijaji: The Changing Role of Cultural Broker,” dalam *Comparative Studies in Society and History*, Vol.2, No.2 (Jan.), 228.

<sup>12</sup> Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 44.



Kondisi seperti itu berbeda dengan kelompok migran di Jawa pada umumnya, di mana kelompok etnis membentuk entitas yang lebih kompak. Sedang kelompok pendatang di Denpasar Bali sadar bahwa dirinya sebagai dunia baru yang berada pada wilayah dunia tua, komunitas baru ini mengidap suatu kebudayaan yang tidak diketahui asalnya sehingga komunitas ini dinamakan “*komunitas terpaksa*” (istilah yang sering digunakan Alo Liliweri).<sup>13</sup>

Temuan itu berbeda dengan teori multikulturalisme yang digagas oleh Michael Walzer ketika membedakan keragaman etnis “dunia baru” dan “dunia tua” di Amerika. Menurutnya, pluralisme kebudayaan dalam “dunia tua” terkikis oleh budaya yang dimainkan (dimiliki) oleh dunia baru (migran dari Eropa) sehingga permintaan “dunia tua” untuk menentukan nasib dirinya sendiri tidak mempunyai gaung di dunia baru, karena mereka sendiri sudah tercabut dari akarnya. Sedang para imigran tidak mempunyai alasan lagi untuk memisahkan diri atau menolak budaya asalnya seperti dalam penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa publik di Amerika. Karena apabila mereka menolak konformitas Inggris, maka penolakannya harus mewujudkan sesuatu yang baru padahal mereka tidak mampu memerintah sendiri dan masih membutuhkan perlindungan paternalistik dari “atasan” (Inggris). Walaupun demikian, mereka tetap mengakui bahwa penduduk asli (negara dunia lama) sebagai masyarakat yang mempunyai budaya dan peradaban yang lebih tinggi dari mereka, sehingga potensi negara dunia tua juga merupakan modal utama untuk membangun *civil society* di Amerika..<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 83.

<sup>14</sup> Michael Walzer, *Multiculturalism and the Politics of Recognition* (Princeton: Princeton University Press, 1992), 99.

### C. Keterbatasan Studi

Sedemikian jauh tetap saja studi ini memiliki sejumlah keterbatasan. Sebagai penelitian kualitatif pembahasan dalam disertasi ini belum menghasilkan teori formal, yaitu proposisi metodologis yang dihasilkan dari uji proposisi. Namun, dari analisis terhadap variabel utamanya, penelitian ini paling tidak telah memproduksi suatu teori substantif, yaitu suatu model realitas harmoni sosial-keagamaan komunitas Islam-Hindu di Denpasar Bali.<sup>15</sup> Oleh karena itu, sejumlah proposisi yang disusun dalam kajian ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Dampak dari implikasi teori seperti ini hanya berlaku dalam *setting* masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Apabila kemudian terdapat dimensi atau aspek-aspek yang bisa diberlakukan pada wilayah lain, maka hanyalah terbatas pada bagian-bagian yang memiliki kesamaan dengan lokus penelitian ini.

Studi ini juga tidak mampu untuk menjangkau data-data nominal secara pasti mengenai keberadaan jaringan kalangan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat termasuk tokoh adat, dan juga kalangan pemerintah yang terlibat secara langsung dalam usaha membangun kerukunan antarumat beragama di daerah Denpasar Bali. Sebagai penelitian kualitatif etnografi, orientasi kajian ini hanya berusaha memahami, menjelaskan dan menganalisis realitas yang ada tentang harmoni sosial-keagamaan yang terkait dengan kerukunan antar umat

---

<sup>15</sup> Komunitas Islam-Hindu Denpasar Bali dalam mengembangkan gagasan harmoni sosial keagamaan yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama yang dikemas dalam konsep "*menyama braya*" tidak berangkat dari wacana pluralisme seperti di daerah-daerah di Indonesia, akan tetapi mereka berangkat dari konsep dan gerakan multikulturalisme menuju bangunan masyarakat madaninya. Demikian juga proses terjadinya realitas sosial tentang kerukunan antarumat beragama dalam kaitannya dengan akulturasi budaya (etnis imigran dengan etnis lokal) terjadi tidak seperti dalam teori multikulturalisme yang di gagas oleh Michael Walzer ketika membedakan keragaman etnis "negara dunia baru" dan "negara dunia tua" di Amerika.

beragama Islam-Hindu di daerah Denpasar Bali melalui pendekatan fenomenologi dengan menggunakan teknik observasi partisipan, akan tetapi peneliti tetap tidak menemukan data tentang gerakan-gerakan radikal yang kiranya akan mengganggu kerukunan antarumat beragama Islam-Hindu di wilayah penelitian. Oleh karena itu masih menghendaki adanya usaha-usaha lain dalam bentuk penelitian ataupun kajian untuk menjelaskan kompleksitas dalam hubungan antarvariabel yang ada.

Tentu ini menjadi kelemahan tersendiri mengingat berbagai variabel yang akan membentuk bangunan kerukunan antarumat beragama di Denpasar Bali tidak diuji secara berkesinambungan.

#### **D. Rekomendasi**

Mengamati fenomena keagamaan yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama di Denpasar Bali merupakan salah satu fenomena tersendiri yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai upaya untuk memahami, menjelaskan dan menganalisis fenomena di daerah tersebut peneliti tanpa pretensi untuk memberikan pengabsahan benar dan salah di dalamnya. Interpretasi yang dilakukan dalam memahami fenomena ini diupayakan semaksimal mungkin untuk menyajikan pola-pola yang dikembangkan oleh masyarakat multikultural dalam membangun dan mengembangkan kerukunan antarumat beragama Islam-Hindu di Denpasar Bali.

Sebagai upaya untuk melihat relevansi dan kekurangan pola-pola yang dikembangkan oleh masyarakat multikultural tersebut, pemahaman ini bisa bersifat *das solen* karena peneliti mencoba untuk berbicara bagaimana seharusnya pola yang harus dibangun untuk menata kehidupan yang harmonis antarumat

beragama bisa diterapkan dan menghasilkan bangunan kehidupan sosial keagamaan yang lebih toleran dan dinamis. Karena fokus pembahasan dalam penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman dan sikap masyarakat Islam dan Hindu yang bersifat inklusif terhadap memaknai dan mengimplementasikan konsep harmoni sosial-keagamaan yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama Islam-Hindu, sehingga pemahaman dan sikap kaum eksklusif kurang mendapat tempat.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan penulis tidak bisa dikatakan telah mampu mengungkap secara penuh dan sempurna. Oleh karena itu, potensi yang dikembangkan oleh masyarakat multikultural Islam dan Hindu di Denpasar Bali tersebut menyisakan harapan-harapan baru bagi peneliti-peneliti berikutnya dengan topik yang sama tetapi dalam perspektif dan paradigma yang berbeda. Hal ini didasari bahwa kehidupan masyarakat selalu dinamis sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pemahaman, interpretasi terhadap teks keagamaan cukup beragam serta akan menghasilkan sikap keberagaman yang berbeda-beda pula. Dengan penelitian-penelitian senada lambat laun problem kerukunan umat beragama di Indonesia akan lebih terurai sehingga dapat menjadi pertimbangan semua pihak termasuk masyarakat, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah untuk lebih ber-empati pada keberagaman dan keyakinan di saat ini dan akan datang.